

**EVALUASI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA NGADIWARNO  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL**

**Vina Anissa Dewi**

**Email: [vinaanissadewi@gmail.com](mailto:vinaanissadewi@gmail.com)**

**Dr. Dra. Kushandajani, M.S.**

**Email: [ningkisworo123@gmail.com](mailto:ningkisworo123@gmail.com)**

**Neny Marlina, S.IP., M.A.**

**Email: [nenymarlina@live.undip.ac.id](mailto:nenymarlina@live.undip.ac.id)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296**

**Website: <http://fisip.undip.com> - Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai evaluasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Program Desa Mandiri Pangan ialah salah satu program pemberdayaan yang digagas oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Tujuannya agar meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha produktif yang selanjutnya diharapkan dapat berimplikasi pada menurunnya angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan di Desa Ngadiwarno menjadikan Desa Ngadiwarno dipilih menjadi salah satu lokasi sasaran pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

Dari penelitian ini, didapatkan hasil mengenai pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tercapainya keberlanjutan dari usaha produktif yang dijalankan kelompok afinitas, tidak sesuai hasil yang didapatkan dengan sumber daya input dan biaya produksi yang dikeluarkan, tidak cukupnya program yang dijalankan dalam mengatasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program, serta tidak tepatnya program yang dijalankan dengan sumber daya lokal Desa Ngadiwarno.

**Kata Kunci:** evaluasi, program desa mandiri pangan, kemiskinan

***EVALUATION OF THE FOOD INDEPENDENT VILLAGE PROGRAM IN  
NGADIWARNO VILLAGE SUKOREJO DISTRICT KENDAL REGENCY***

**Vina Anissa Dewi**

**Email: [vinaanissadewi@gmail.com](mailto:vinaanissadewi@gmail.com)**

**Dr. Dra. Kushandajani, M.S.**

**Email: [ningkisworo123@gmail.com](mailto:ningkisworo123@gmail.com)**

**Neny Marlina, S.IP., M.A.**

**Email: [nenymarlina@live.undip.ac.id](mailto:nenymarlina@live.undip.ac.id)**

**Departement of Politics and Government**

**Faculty of Social dan Politics Sciences, Diponegoro University**

**Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal Code: 1296**

**Website: <http://fisip.undip.com> - Email: [http://fisip@undip.ac.id](mailto:http://fisip@undip.ac.id)**

***ABSTRACT***

*This research is included in qualitative research with the aim of explaining the evaluation of the Food Independent Village Program in Ngadiwarno Village, Sukorejo District, Kendal Regency. The Food Independent Village Program is one of the empowerment programs initiated by the Food Security Agency, Ministry of Agriculture. The goal is to improve community food security through the development of productive business groups which are then expected to have implications for reducing poverty. The high poverty rate in Ngadiwarno Village has made Ngadiwarno Village one of the target locations for the implementation of the Food Independent Village Program.*

*The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, literature study, and documentation. Interviews were conducted with parties related to the implementation of the Food Independent Village Program in Ngadiwarno Village, Sukorejo District, Kendal Regency.*

*From this research, it was found that the implementation of the Food Independent Village Program in Ngadiwarno Village, Sukorejo District, Kendal Regency had not run optimally in accordance with the previously set goals. This is indicated by the inability to achieve sustainability of the productive businesses run by the affinity group, the incompatibility of the results obtained with the input resources and production costs incurred, the insufficient program being implemented in overcoming the problems that arise during program implementation, and the inappropriateness of the program being implemented. with the local resources of Ngadiwarno Village.*

***Keywords:*** *evaluation, food independent village program, poverty*

## A. PENDAHULUAN

Problematika kemiskinan hingga kini masih menjadi fokus bagi bangsa Indonesia yang tak kunjung menemui titik penyelesaiannya. Kemiskinan membuat jutaan anak kesulitan mengakses pendidikan serta membatasi jutaan masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak. Permasalahan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari masalah kerawanan pangan. Karena kemiskinan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Sehingga kerawanan pangan terjadi bukan karena rendahnya produksi pangan tetapi karena ketiadaan akses bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya (Wichelns, 2015:190). Lebih lanjut, kemiskinan terjadi akibat dari ketidakmampuan pendapatan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, baik berupa kebutuhan pangan maupun non pangan sehingga mereka tidak mampu menjamin kehidupannya ke depan (Suryawati, 2004:122).

Sejatinya, pangan merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi setiap harinya. Sehingga menciptakan ketahanan pangan merupakan hal yang tak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan. Sejak dahulu, pemerintah telah meluncurkan banyak program yang berfokus

pada pengentasan kemiskinan. Namun, harus diakui bahwa beberapa program tersebut belum mampu berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari kegagalan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan sebelumnya, maka diperlukan strategi dan terobosan jitu yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan secara masif. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang menyesuaikan keadaan, potensi, dan sumber daya lokal setiap daerah atau sasaran program (Aniyati, 2018:99).

Melihat permasalahan kemiskinan di atas, diluncurkan Program Desa Mandiri Pangan (DMP) oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2006. Sebagaimana termuat pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010, bahwa Program Desa Mandiri Pangan ialah salah satu program yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan penguatan sistem ketahanan. Prosesnya berorientasi terhadap penumbuhan ekonomi produktif, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan

kepada kelompok sasaran untuk menggali potensi atau sumber daya lokal yang ada di wilayahnya untuk dimanfaatkan menjadi suatu hal yang memiliki nilai lebih yang kemudian dapat mencukupi kebutuhan hidupnya serta demi mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.

Lokasi sasaran Program Desa Mandiri Pangan ialah desa dengan kategori rawan pangan yang jumlah rumah tangga miskinnya di atas 26,33%. Program Desa Mandiri Pangan telah terlaksana di seluruh provinsi di Indonesia, tak terkecuali Jawa Tengah. Di mana persoalan kemiskinan di Jawa Tengah lebih terkonsentrasi pada wilayah perdesaan daripada perkotaan.

Kabupaten Kendal menjadi satu dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang melaksanakan Program Desa Mandiri Pangan. Meskipun telah melaksanakan Program Desa Mandiri Pangan, namun ternyata jumlah penduduk miskin Kabupaten Kendal sejak tahun 2017 hingga 2020 masih menempati urutan tertinggi di antara kabupaten/kota di sekitar yang wilayahnya berbatasan langsung yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kabupaten Batang.

Lokasi penelitian evaluasi Program Desa Mandiri Pangan berada di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo. Di mana

berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015, Kecamatan Sukorejo menjadi kecamatan dengan jumlah rumah tangga dan individu dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin terbanyak di Kabupaten Kendal. Jumlahnya sebanyak 6.225 rumah tangga dan 20.307 individu.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020, Desa Ngadiwarno menempati urutan kedua desa dengan jumlah rumah tangga sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan hampir miskin terbanyak di Kecamatan Sukorejo. Di mana rumah tangga sangat miskin di Desa Ngadiwarno jumlahnya mencapai 100 rumah tangga. Kemudian rumah tangga miskin berjumlah 98 rumah tangga, hampir miskin 103 rumah tangga, dan rentan miskin 107 rumah tangga.

Dalam rangka mengatasi tingginya angka kemiskinan ini, pemerintah meluncurkan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno pada tahun 2018 dengan sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Terdapat dua kelompok afinitas di Desa Ngadiwarno yang diberi nama Ngudi Rahayu dan Suka Makmur yang menjalankan usaha produktif di bidang peternakan kambing. Padahal, sumber daya lokal Desa Ngadiwarno berada

di sektor pertanian padi dan jagung. Di mana sebesar 85% luas wilayah Desa Ngadiwarno merupakan lahan pertanian.

Selain itu, ternak kambing juga rentan terhadap cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan. Karena apabila kambing ditanakkan di daerah dengan curah hujan tinggi, kambing menjadi lebih mudah terserang penyakit karena kandang yang lembap. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Desa Ngadiwarno terletak di wilayah dataran tinggi yang memiliki iklim dan cuaca yang dingin serta curah hujan yang cukup tinggi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengevaluasi mengenai Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno melalui penelitian yang berjudul Evaluasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Kemiskinan**

Pada dasarnya, kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan yang terjadi ketika penghasilan yang diterima tidak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, akibatnya mereka tidak mampu dalam menjamin kehidupannya ke depan (Suryawati, 2004:122). Lebih lanjut, Supriatna (1997:90) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan serba terbatas

yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang namun bukan atas kehendaknya. Sedangkan apabila mengacu pada pengertian kemiskinan menurut Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, dijelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi ekonomi dan sosial yang menyebabkan seseorang ataupun sekelompok orang tidak sanggup dalam mencukupi hak-hak dasarnya demi mencapai kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2005:13).

Kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi. Masalah kemiskinan justru cenderung kian kompleks dan kian meresahkan masyarakat karena sifatnya yang multidimensi. Kemiskinan struktural menjadi bentuk kemiskinan dengan sorotan terbanyak dalam bidang ilmu sosial, terutama di kalangan lembaga kredit seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Secara teoritis, kemiskinan struktural ialah kondisi akibat dari struktur sosial yang memaksa seseorang tidak mampu untuk mengubah nasibnya dan meningkatkan taraf hidupnya. Pada hakekatnya, yang menjadi sumber utama terjadinya kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan yang mengurung mereka dalam kemiskinan secara turun-temurun.

Dengan begitu, dibutuhkan strategi untuk mengentaskan kemiskinan yang dapat menghapuskan ketidakberdayaan masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermartabat, salah satunya melalui kebijakan publik yang fokus terhadap pengentasan kemiskinan.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Program pengentasan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan, karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi kemiskinan yang dialaminya sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhannya sendiri. Dengan program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengentaskan dirinya sendiri dari lingkaran kemiskinan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal serta potensi di sekelilingnya.

Dikutip dari buku yang ditulis oleh Rosmedi dan Riza Risyanti (2006:1), istilah pemberdayaan diambil dari asal kata “daya” artinya adalah kekuatan atau kemampuan. Kemudian diimbui dengan awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya adalah memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan. Kata “berdaya” tersebut diimbui awalan pe-, sisipan -m, dan

akhiran -an maka menjadi kata “pemberdayaan” yang berarti membuat suatu hal menjadi berdaya atau memiliki kekuatan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, istilah pemberdayaan dikenal dengan *empowerment* yang berarti sumber kreativitas atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang.

Secara konseptual, istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah usaha pemberian daya yang meliputi pengembangan, memperkuat daya atau potensi, dan menciptakan kemandirian (Winarni, 1998:75-76). Semua masyarakat pasti memiliki daya, namun terkadang dirinya tidak menyadari akan adanya daya tersebut. Sehingga melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk menggali lebih dalam daya atau potensi yang dimilikinya untuk kemudian dikembangkan dengan tujuan akhir yaitu menciptakan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat harus dapat menempatkan masyarakat sebagai subyek yang terlibat langsung dalam proses pemberdayaan yang menitikberatkan pada penguatan potensi atau sumber daya lokal yang dimilikinya. Masyarakat miskin tidak lagi dipandang sebagai masyarakat yang serba kekurangan dan obyek yang hanya menerima bantuan saja. Tetapi, dianggap

sebagai subyek yang mempunyai beragam kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk perubahan hidupnya.

Untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan yaitu kemandirian, diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) terdapat tiga tahap pemberdayaan, yaitu:

(a) Tahap penyadaran

Sebagai awalan, masyarakat yang hendak diberdayakan harus diberikan semangat untuk membangkitkan kepercayaan dalam dirinya bahwa mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari rantai kemiskinan yang selama ini membelenggunya.

(b) Tahap pengkapasitasan (*capacity building*)

Sebelum memasuki tahap pemberian daya, masyarakat yang hendak diberdayakan harus sudah mampu baik dari segi manusia, organisasi, maupun sistem nilai untuk mengelola dan memanfaatkan daya yang diberikan. Pada tahap ini masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan hidup yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya.

(c) Tahap pemberian daya

Tahap ini merupakan tahap pemberian daya, peluang, kekuatan, atau otoritas

kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Misalnya adalah memberikan otoritas kepada masyarakat untuk mengelola usaha yang dijalankan berdasarkan aspirasinya, tentunya yang sudah melewati tahap penyadaran dan pengkapasitasan.

### 3. Kebijakan Publik

Menurut Easton dalam Taufiqurakhman (2014:3), kebijakan publik ialah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara paksa. Sedangkan Thomas R. Dye dalam Islamy (2009:19) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu hal yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu (*anything a government chooses to do or not to do*). Definisi ini menekankan bahwa keputusan apapun yang pemerintah pilih merupakan salah satu kebijakan publik yang tentu memiliki tujuan dibaliknya. Kebijakan publik mencakup seluruh tindakan dan keputusan pemerintah, sehingga kebijakan publik tidaklah semata-mata hanya kemauan pemerintah saja.

Lebih lanjut, James Anderson dalam Winarno (2007:18) memaparkan bahwa kebijakan ialah arah dari tindakan yang ditentukan oleh aktor dengan tujuan untuk mengatasi sebuah permasalahan atau

persoalan. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai aturan kehidupan masyarakat yang wajib ditaati dan bersifat mengikat, yaitu apabila terdapat pelanggaran akan diberikan sanksi oleh lembaga yang berwenang (Dwidjowijoto, 2004:7).

Kebijakan publik tidak mungkin lahir dan ada dengan begitu saja. Tentu ada proses panjang yang harus ditempuh untuk melahirkan kebijakan publik. Tahapan atau proses penyusunan kebijakan publik menjadi sebuah proses yang kompleks karena memerlukan pelibatan dari berbagai variabel. Sehingga dalam prosesnya, penyusunan kebijakan publik terbagi mejadi beberapa tahapan untuk memudahkan ketika mengkaji kebijakan publik. Seorang pakar bernama William N. Dunn (2003:24) mengungkapkan bahwa terdapat lima tahap kebijakan publik, yaitu:

(a) Tahap Penyusunan Agenda

Tahap di mana para aktor yang berwenang membangun persepsi bahwa suatu fenomena yang terjadi dianggap sebagai masalah. Selanjutnya dari masalah-masalah yang muncul ini diseleksi dan dibuat batasan masalah untuk kemudian memobilisasi dukungan dari masyarakat dan kekuatan politik agar masalah tersebut dapat masuk agenda kebijakan aktor-aktor tersebut.

(b) Tahap Formulasi Kebijakan

Persoalan yang sudah memasuki agenda kebijakan tersebut dianalisis dengan mengumpulkan segala informasi yang berkaitan untuk ditemukan alternatif-alternatif sebagai solusi pemecahannya. Berbagai alternatif tersebut akan saling berkompetensi agar dipilih menjadi kebijakan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi.

(c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari berbagai alternatif kebijakan yang telah diusulkan tentu tidak semuanya digunakan, hanya salah satu yang akan dipilih dan diadopsi untuk menuju tahap selanjutnya yang didukung oleh mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

(d) Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan atau kebijakan yang telah diambil kemudian diimplementasikan oleh organisasi pelaksana kebijakan dengan dukungan sumberdaya yang dibutuhkan. Dalam tahap implementasi ini seringkali ditemukan mekanisme sanksi yang ditujukan kepada para pelanggar kebijakan agar kebijakan berjalan dengan baik.

(e) Tahap Evaluasi Kebijakan.

Setelah kebijakan diimplementasikan, kebijakan harus dievaluasi. Tahap evaluasi menjadi bagian penting dan tidak dapat

terpisahkan dari rangkaian siklus kebijakan publik. Tahap ini ditujukan agar diketahui apakah kebijakan publik terlaksana seperti dengan tujuan yang sebelumnya telah disepakati. Selain itu, evaluasi kebijakan juga dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan di masa depan.

Lebih lanjut, Parsons dalam Anggara (2014:274) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik ialah bagaimana kebijakan publik tersebut dapat ditaksirkan, diaudit, dikontrol, serta dinilai. Sedangkan menurut Muhadjir dalam Widodo (2008:122), evaluasi kebijakan publik ialah salah satu dari tahapan kebijakan publik dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana hasil yang didapatkan dari kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Caranya dengan membandingkan antara hasil yang didapatkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketika hendak mengevaluasi sebuah kebijakan publik, tentu diperlukan adanya sebuah kriteria sebagai kerangka dasar untuk menilai apakah sebuah kebijakan dianggap gagal atau berhasil (Wibawa, 1994:63). William N. Dunn dalam bukunya telah mengemukakan kriteria evaluasi kebijakan publik seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel Kriteria Evaluasi Kebijakan

<b>Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan berguna atau bernilai?

Sumber: William N. Dunn (2003:610)

Berdasarkan tabel tersebut, William N. Dunn menggambarkan bahwa terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan publik. *Pertama*, efektivitas yang digunakan untuk menilai sejauhmana pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Kedua*, efisiensi berkenaan dengan seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dari program. *Ketiga*, kecukupan yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana hasil dan dampak program dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada. *Keempat*,

pemerataan untuk menilai apakah hasil dan manfaat dari adanya program dapat dirasakan merata oleh seluruh sasaran program. *Kelima*, responsivitas yang berkenaan dengan tanggapan atau respon dari sasaran program apakah memuaskan atau tidak. *Keenam*, kriteria ketepatan untuk menilai apakah hasil dari program benar-benar berguna dan bermanfaat sehingga memperlihatkan apakah pelaksanaan program sudah tepat atau kurang tepat. Kriteria inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengevaluasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif ialah sebuah proses penelitian yang ditempuh guna memperoleh data yang bersifat deskriptif berdasarkan keadaan nyata dari sasaran penelitian yang hasilnya lebih menekankan makna.

### **D. HASIL PENELITIAN**

Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno ini diluncurkan pada tahun 2018. Alasan dipilihnya Desa Ngadiwarno menjadi lokasi pelaksanaan Program Desa

Mandiri Pangan dikarenakan pada tahun 2017 menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Desa Ngadiwarno termasuk dalam desa rawan pangan. Namun, pemilihan ini juga tidak serta merta dari DTKS saja, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi agar pelaksanaan program tidak salah sasaran.

Penelitian evaluasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno didasarkan pada teori evaluasi William N. Dunn. Hal ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan dari Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno sehingga dapat dijadikan dasar sebagai penentuan kebijakan di masa yang akan datang. Adapun indikatornya adalah:

#### **1. Efektivitas**

Setiap program yang dijalankan oleh pemerintah tentu memiliki target dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno ini adalah berkembangnya kelompok usaha produktif di bidang peternakan kambing. Sehingga diharapkan hasil dari berternak kambing tersebut dapat memberikan tambahan penghasilan atau pendapat kelompok sasaran. Secara jangka panjang, diharapkan dapat mengentaskan

permasalahan kemiskinan yang terjadi di kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kelompok usaha produktif yang dijalankan belum mampu berkembang dengan baik. Terlihat dari tidak bertambahnya jumlah kelompok afinitas, berkurangnya jumlah anggota kelompok afinitas, dan tidak berkembangnya jumlah hewan ternak dengan baik. Merawat kambing untuk ditanakkan merupakan inti dari Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno. Namun dikarenakan cuaca ekstrem dan kelalaian anggota kelompok afinitas, kambing yang ditanakkan menjadi banyak yang mati. Sehingga kambing yang berhasil ditanakkan jumlahnya menjadi tidak maksimal.

Program Desa Mandiri Pangan dapat dikatakan berhasil apabila kelompok usaha produktif yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Hal yang menandainya adalah bertambahnya jumlah kelompok afinitas dan bertambahnya jumlah anggota kelompok afinitas. Dengan begitu, maka masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari program jumlahnya lebih banyak. Sehingga manfaat Program Desa Mandiri Pangan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Selain dilihat dari dua hal tersebut, berkembang atau tidaknya kelompok usaha

produktif dalam program ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kambing yang ditanakkan. Selama kurun waktu tiga tahun pelaksanaan program yaitu 2018-2021, kambing yang dipelihara tidak berkembang dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya angka kematian dari hewan ternak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok usaha produktif yang dijalankan dalam Program Desa Mandiri Pangan ini belum berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan program yang sebelumnya telah ditetapkan.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dengan usaha yang telah dilakukan untuk mencapai efektivitas tersebut. Dalam program ini, efektivitas atau hasil yang diinginkan adalah peningkatan pendapatan anggota kelompok afinitas di Desa Ngadiwarno dari usaha produktif yang dijalankan yaitu berternak kambing.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyalurkan bantuan indukan ternak dan pengobatan ternak gratis kepada kelompok afinitas. Bantuan indukan kambing telah diberikan sejak September 2018 sejumlah 27 ekor indukan kambing betina dan 3 ekor kambing jantan kepada masing-masing kelompok afinitas untuk selanjutnya dipelihara dan

diternakkan oleh kelompok afinitas. Selain diberikan bantuan indukan ternak, kelompok afinitas juga diberikan pelatihan budidaya ternak, pelatihan pembuatan pupuk organik dari limbah kotoran kambing, dan pelatihan mengenai kesehatan hewan. Tidak hanya itu, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal juga mengadakan kunjungan rutin untuk memberikan pengobatan ternak secara gratis. Meskipun intensitasnya masih sangat kurang yakni hanya satu kali dalam setahun.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, bahwa setiap kelompok afinitas harus memelihara kambing secara komunal dalam satu kandang, maka setiap kelompok masih harus membuat kandang. Biaya pembuatan kandang ini dibebankan kepada seluruh anggota kelompok afinitas yang masing-masing anggota mengeluarkan iuran dari dana pribadinya. Kemudian setiap bulan anggota kelompok afinitas juga dibebankan iuran untuk pembayaran listrik yang digunakan untuk menerangi kandang. Beruntungnya, untuk memberikan pakan tidak membutuhkan biaya karena rumput dan dedaunan tumbuh subur dan melimpah di sekitar Desa Ngadiwarno.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh dari usaha berternak kambing yang dilakukan oleh kelompok afinitas belum mencapai hasil

yang baik sesuai dengan tujuan yaitu berkembangnya usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok afinitas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setelah tiga tahun pelaksanaan program, kelompok afinitas Ngudi Rahayu hanya menjual 23 ekor kambing dan kelompok afinitas Suka Makmur hanya menjual 25 ekor kambing. Jumlah ini jika diukur dari segi nominal tentu sangat sedikit dan tidak cukup apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedikitnya jumlah hasil yang didapatkan ini dipengaruhi oleh tingginya angka kematian ternak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil yang didapatkan dari berternak kambing yang dilakukan oleh kelompok afinitas Ngudi Rahayu dan Suka Makmur tidak sebanding dengan usaha yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun kelompok afinitas. Beruntungnya, memelihara kambing ini bukanlah sumber utama penghasilan anggota kelompok, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka masih bisa tercukupi dari mata pencaharian utama anggota kelompok yaitu sebagai petani.

### **3. Kecukupan**

Pada dasarnya, Program Desa Mandiri Pangan ini diluncurkan sebagai alternatif

untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Desa Ngadiwarno. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukorejo Tahun 2020, Desa Ngadiwarno menempati urutan kedua dengan jumlah rumah tangga sangat miskin terbanyak di Kecamatan Sukorejo. Dengan diluncurkannya Program Desa Mandiri Pangan diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Desa Ngadiwarno. Namun ternyata Program Desa Mandiri Pangan belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan hasil yang didapatkan dari Program Desa Mandiri Pangan ini sangat sedikit bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno. Pertama, terkait tingginya angka kematian hewan ternak akibat cuaca ekstrem di Desa Ngadiwarno. Saat musim penghujan, Desa Ngadiwarno mengalami intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan ternak terserang penyakit yang dapat menyebabkan kematian ternak. Sebagai solusi, ternak yang dipelihara jenisnya diganti menjadi domba di mana sebelumnya adalah kambing. Kedua, selain disebabkan

oleh cuaca ekstrem kematian ternak juga disebabkan oleh kelalaian anggota kelompok afinitas dalam memberikan pakan. Kesadaran masing-masing anggota kelompok afinitas ini sangat diperlukan untuk keberhasilan program. Permasalahan yang ketiga adalah keterbatasan anggaran dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.

Setiap tahun, Dinas Pertanian dan Pangan rutin mengadakan kunjungan ke Desa Ngadiwarno untuk memberikan pengobatan ternak gratis. Namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia, pengobatan ternak hanya dapat dilakukan sekali setahun yang tentunya masih sangat kurang di mana ternak dapat terserang penyakit kapan saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno dinilai belum cukup mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Desa Ngadiwarno. Terkait permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program juga belum diselesaikan secara maksimal.

#### **4. Pemerataan**

Pemerataan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn berkenaan dengan pertanyaan apakah biaya dan manfaat telah terdistribusi secara merata

kepada seluruh kelompok sasaran. Pemerataan dapat dinilai dengan melihat pemerataan distribusi dalam hal pengelolaan kelompok afinitas dan penugasan dalam merawat hewan ternak.

Dalam hal pengelolaan kelompok afinitas, baik dalam kelompok Ngudi Rahayu maupun Suka Makmur sudah terdistribusi secara baik. Di mana sudah terdapat pembagian tanggung jawab sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota kelompok. Pembagian struktur organisasi ini ditentukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota kelompok afinitas tanpa terkecuali. Begitu pula dengan setiap pengambilan keputusan dalam kelompok juga selalu dimusyawarahkan.

Selain pendistribusian pengelolaan kelompok afinitas, pemerataan juga dapat dinilai dari pendistribusian penugasan dalam pemeliharaan ternak. Dalam hal ini penugasan juga sudah terdistribusi dengan baik. Di mana setiap anggota kelompok afinitas Ngudi Rahayu maupun Suka Makmur semuanya mendapatkan jadwal bergilir untuk merawat kambing, misalnya menjaga kandang di malam hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi penugasan dalam kelompok afinitas Program Desa Mandiri Pangan di Desa

Ngadiwarno dinilai sudah merata. Terbukti dengan sudah terdistribusikannya tanggung jawab pengelolaan kelompok afinitas dengan baik melalui cara musyawarah yang melibatkan seluruh anggota kelompok. Selain itu, distribusi penugasan dalam pemeliharaan ternak juga sudah terbagi merata kepada seluruh anggota kelompok afinitas tanpa terkecuali.

## **5. Responsivitas**

Jika dilihat dari segi pemahaman kelompok sasaran terhadap program ini, pada dasarnya seluruh narasumber telah memahami dengan baik mengenai Program Desa Mandiri Pangan dalam hal definisi maupun tujuan program. Pemahaman kelompok sasaran terhadap program yang dijalankan ini dapat menjadi salah satu wujud dukungan yang dapat meningkatkan keberhasilan program. Karena dengan berbekal pemahaman inilah kelompok sasaran secara jelas mengetahui langkah apa sajakah yang harus ditempuh demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Meskipun setelah pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan didapatkan hasil yang kurang memuaskan apabila diukur dari segi nominal, namun kedua kelompok afinitas baik Ngudi Rahayu maupun Suka Makmur tetap memberikan sambutan baik dan menyatakan bahwa

program ini bermanfaat. Program Desa Mandiri Pangan ini telah berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat Desa Ngadiwarno. Salah satunya adalah kelompok afinitas menjadi tahu cara memelihara kambing yang baik, mengetahui pakan yang sehat dan bagus untuk hewan ternak, mengetahui pengobatan untuk ternak, serta meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kerjasama antar warga Desa Ngadiwarno yang tergabung dalam kelompok afinitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok sasaran dalam hal ini adalah kelompok afinitas memberikan tanggapan yang baik terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno. Program Desa Mandiri Pangan ini telah memberikan manfaat bagi kemajuan kelompok afinitas baik dari segi keterampilan beternak kambing maupun keterampilan berorganisasi.

## **6. Ketepatan**

Pada dasarnya, anggota kelompok afinitas baik kelompok afinitas Ngudi Rahayu maupun Suka Makmur berprofesi sebagai petani dengan mayoritas termasuk dalam rumah tangga miskin. Kemudian sebagai langkah pengetasan kemiskinan, diluncurkan Program Desa Mandiri Pangan ini dengan harapan dapat menambah

penghasilan anggota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun setelah tiga tahun pelaksanaan program, ternyata penambahan penghasilan tidak dirasakan signifikan oleh anggota kelompok afinitas. Di mana hasil yang didapat dinilai tidak sebanding dengan energi yang dikeluarkan oleh anggota kelompok afinitas yang harus meluangkan waktu untuk mencarikan pakan dan jaga malam di kandang.

Selain itu, bentuk bantuan yang diberikan dalam Program Desa Mandiri Pangan ini juga tidak sesuai dengan sumber daya lokal Desa Ngadiwarno. Menurut pedoman umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa Program Desa Mandiri Pangan merupakan program peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif dengan berbasis sumber daya lokal. Desa Ngadiwarno memiliki sumber daya lokal di bidang pertanian. Di mana mayoritas lahan di Desa Ngadiwarno diperuntukkan sebagai lahan untuk bertani. Dari 487 ha luas Desa Ngadiwarno, sebesar 414,79 ha atau sebesar 85% dari total keseluruhan luas Desa Ngadiwarno merupakan lahan pertanian. Namun, program yang dijalankan justru pada bidang peternakan kambing.

Selain tidak sesuai dengan sumber daya lokal Desa Ngadiwarno, kambing juga merupakan hewan yang kurang cocok dipelihara di daerah dingin dengan intensitas hujan yang tinggi. Sedangkan Desa Ngadiwarno terletak di dataran tinggi dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga kambing yang dipelihara banyak yang terserang penyakit dan mati.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat yang diterima kelompok sasaran belum sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Hal ini salah satunya dipengaruhi karena kurang tepatnya program yang dijalankan dengan sumber daya lokal Desa Ngadiwarno. Kesesuaian program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan sumber daya lokal kelompok sasaran menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan program serta meminimalisir kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan-perbaikan yang lebih mengedepankan kondisi dan sumber daya lokal kelompok sasaran agar tercipta ketepatan program yang dijalankan dengan kondisi kelompok sasaran.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari

pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno didapatkan *output* berupa terbentuknya kelompok afinitas yaitu Ngudi Rahayu dan Suka Makmur, terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan kelompok afinitas, terselenggaranya pendampingan dari sarjana pendamping, serta tersalurkannya dan termanfaatkannya bantuan indukan kambing untuk ditenakkan oleh kelompok afinitas.

Secara *outcome*, pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno dapat dikatakan tidak berjalan dengan optimal. Hal ini didasarkan atas tidak tercapainya keberlanjutan dari usaha produktif yang dijalankan kelompok afinitas, tidak sesuainya hasil yang didapatkan dengan sumber daya input dan biaya produksi yang dikeluarkan, tidak cukupnya program yang dijalankan dalam mengatasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program, serta tidak tepatnya program yang dijalankan dengan sumber daya lokal Desa Ngadiwarno.

Kemudian jika dilihat dari segi distribusi penugasan dan tanggapan kelompok sasaran, terlihat bahwa penugasan pengelolaan kelompok dan pemeliharaan ternak telah terdistribusi secara merata

kepada seluruh anggota kelompok afinitas. Meskipun secara nominal tidak memperoleh hasil signifikan, namun anggota kelompok afinitas tetap menganggap Program Desa Mandiri Pangan ini tetap memberikan manfaat dalam hal peningkatan keterampilan terkait cara berternak kambing dan keterampilan berorganisasi. Dengan demikian, kelompok sasaran dalam hal ini kelompok afinitas di Desa Ngadiwarno berharap terdapat perbaikan untuk menyesuaikan jenis bantuan atau program yang dijalankan dengan kondisi atau sumber daya lokal yang dimiliki Desa Ngadiwarno.

### **Saran**

Adapun saran yang peneliti dapat sampaikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya program-program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah lebih disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kondisi yang terjadi pada kelompok sasaran. Dengan demikian, maka dapat meningkatkan keberhasilan program.
2. Hendaknya pelatihan-pelatihan yang diberikan dapat ditambah dan jangkauannya diperluas hingga di luar kelompok sasaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan masyarakat Desa Ngadiwarno yang

nantinya menjadikan masyarakat Desa Ngadiwarno semakin berdaya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aniyati, Lilik dan Alfiah. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Kediri,” *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis*, 1(1), 97-113. <http://dx.doi.org/10.47201/jamin.v1i1.9>
- Bappenas. (2005). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dye, Thomas R. (1972). *Understanding Public Policy*. USA: Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ.
- Rosmedi dan Riza Risyanti. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Supriatna, Tjahya. (1997). *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Jarnasy.

Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama [Pers].

Wibawa, Samodra, dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wichelns, Dennis. (2015). "Achieving Water and Food Security in 2050: Outlook, Policies, and Investments," *Journal Agriculture by MDPI*, 5(2), 188-220.  
<https://doi.org/10.3390/agriculture5020188>

Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Banyumedia.

Winarni, Tri. (1998). *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa*

*Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Adita Media.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wrihatnolo, Randy dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

### **Peraturan Perundangan**

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.